Penerapan Pemberian Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Berdasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 di Kabupaten Malang

Nuryanti Puji Utami ^a *

^a Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Dikirim tanggal: 26 April 2017

Revisi pertama tanggal: 08 Agustus 2017

Diterima tanggal: 25 September 2017

Tersedia online tanggal: 05 Oktober 2017

Keywords: *free law service, notary, poor people*

ABSTRACT

The Implementation of article 37 verse (1) UUJN it contains about the obligation of a notary gives free law service for the poor people with correct existencxe of notary's instinct, it means notary must have faith authentically and inner strength about giving free help for the poor people. The qualification factors of giving free law service in notarialfield or the problems fact are 1) Because people in general, they don't know about there is act thats regulates giving free law service in notarial field for the poor people,2) Poorly supervision by MPD, MPW, and MPP, 3) No clear boundary about giving free law service for the poor people.

INTISARI

Penerapan dari Pasal 37 Ayat (1) UUJN mengatur perihal kewajiban seorang notaris memberikan pelayanan hukum secara gratis terhadap orang miskin karena anggapan dan keyakinan notaris, maksudnya notaris harus memiliki pemahaman nyata dan batin tentang bantuan gratis yang diperuntukkan terhadap orang miskin. Hal-hal yang menjadi penghambat pemberian bantuan hukum oleh notaris atau kendala yang dihadapi adalah: 1) Sebab mayoritas masyarakat awam tidak mengetahui tentang adanya Undang-Undang Jabatan Notaris terutama pemberian bantuan hukum gratis kepada orang miskin, 2) minimnya pengawasan oleh MPD, MPW, dan MPP, 3) Belum ada batasan pasti tentang pemberian bantuan hukum secara gratis untuk masyarakat miskin.

2017 FIA UB. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia secara jelas dijelaskan dalam UUD Tahun 1945. Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diterangkan sebagai berikut:

Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu tidak ada kecualinya.

Selanjutnya dalam Konstitusi 1950 Hak Asasi Manusia diatur secara terperinci dan lengkap, yaitu dalam BAB I bagian 5 dan Bagian 6 yang mengatur tentang kewajiban asasi pemerintah terhadap rakyat, yaitu tentang hak pribadi manusia, hak perlakuan dan perlindungan yang sama oleh Undang-Undang, hak menuntut perlindungan yang sama, dan hak mendapat bantuan hukum (Suhrawardi K Lubis, 1993:60).

Tentang bantuan hukum tentunya tidak bisa dilepaskan dengan keberagaman problema masyarakat, karena antara masalah dan bantuan hukum adalah dua

* Corresponding author. Tel.: +62-821-3263-0275; e-mail: nuryanti.pujiutami@yahoo.com

hal yang berhubungan. Tetapi agar hukum berfungsi dengan perlu kerjasama dan sinergi antara padunya penegak hukum dan aturan hukum.

Bantuan hukum secara definitif luas biasa diartikan sebagai upaya untuk membantu orang miskin (Adnan Buyung Nasution, 1988:8). Pernyataan itu menggambarkan bahwa keberadaan dan pelaksanaan tentang bantuan hukum, tidak bisa dilepaskan dari keadaan yang ada dalam masyarakat, dalam kenyataannya ternyata juga berperan dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat, terutama untuk masyarakat yang tidak mampu atau miskin.

Pasal 2 Undang-Undang Bantuan Hukum menganut enam asas yaitu asas keadilan, persamaan kedudukan di dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas. Keenam asas tersebut diatas berimbang bantuan hukum dalam praktek yang terjadi saat ini, apakah dalam kenyataannya asas-asas tersebut telah benar-benar terpenuhi dalam efektifitas penerapan suatu aturan hukum.

Pasal 37 ayat (1) disini nyata meskipun notaris mempunyai hak gaji karena pekerjaannya, memiliki hak dibayar oleh penghadap, akan tetapi notaris harus memberikan pelayanan hukum secara gratis kepada orang miskin. Ukuran miskin dan tidak miskin dalam hal ini notaris sendiri yang menggolongkan, pelayanan hukum bagi yang bisa membayar honorarium Notaris atau yang diberikan secara gratis karena keterbatasan financial penghadap, harus diperlakukan sama, sebab produk intelektual yang dihasilkan notaris sama, untuk yang bisa membayar atau yang tidak mampu.

Dari uraian di atas, bisa dijelaskan tentang kewajiban notaris yang tertuang dalam Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengharuskan Notaris untuk memberikan jasa pelayanan hukum secara gratis kepada orang miskin serta tidak boleh ada penolakan notaris, karena sanksinya diatur tegas dalam Pasal 37 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti, menganalisis dan mengkaji "Penerapan Pemberian Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Berdasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Di Kabupaten Malang" dan selanjutnya penulis akan mengkaji dan menganalisis secara lebih mendalam tentang permasalahan, yaitu sebagai berikut:

- a) Bagaimana implementasi pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris di Kabupaten Malang ?; dan
- b) Apa saja faktor-faktor yang menjadi kualifikasi pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris di Kabupaten Malang?.

2. Teori

2.1 Teori Efektifitas Hukum

Penerapan suatu aturan dikatakan berjalan efektif jika masyarakat dapat menerima aturan kaidah tersebut sebagai hal yang bergunasehingga membuat masyarakat menjadi aman, tertib, dan damai. Dalam teorinya, Lawrence Meir Friedman (1975:16) berpendapat mengenai efektifitas hukum, bahwa ada tiga elemen utama dalam system hukum (*Legal System*), yaitu:

a) Subtansi Hukum (*Legal Structure*)

Subtansi Hukum merupakan isu *case* hukum itu sendiri. Pengolahan dan uji kelayakan aturan hukum dilakukan oleh lembaga legislatif. Suatu kebijakan undang-undang harus sesuai dengan yang diharapkan dan dibutuhkan masyarakat.

b) Struktur Hukum (*Legal Substance*)

Lembaga hukum di Indonesia terdiri dari lembaga – lembaga yang mempunyai andil dalam supremasi hukum dan mempunyai *job description* sendiri-sendiri dalam mewujudkan penegakkan hukum.

c) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya Hukum hal yang tumbuh dan berkembang serta menjadi kebiasaan di masyarakat.

Soerjono Soekanto mengetengahkan hal-hal yang menyebabkan suatu aturan menjadi efektif (H.R. Otje Salman & Anton F Susanto, 2012:62), yaitu :

- Faktor produk hukum;
- Faktor Pelaku hukum;
- Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;
- Faktor kesadaran masyarakat; dan
- Faktor budaya hukum.

2.2 Teori Kewenangan

Soerjono Soekato menguraikan perbedaan antara "kekuasaan" dan "wewenang" hal yang dapat menguasai dan mempengaruhi orang lain disebut "kekuasaan", sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mendapat pengakuan dari dan dukungan dari sekelompok masyarakat (2003:91-92).

Berdasarkan sumbernya wewenang karena Undang-Undang dibedakan menjadi dua, yaitu:

a) Atribusi

Adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan berdasar kewenangan yang dibuat oleh Undang-Undang.

b) Pelimpahan wewenang

Adalah penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan dalam melaksanakan tugas-tugas kewajiban untuk bertindak sendiri.

Dalam hal notaris sebagai pejabat umum yang mempunyai berwenang membuat, kewenangan yang diberikan oleh negara kepada notaris dalam bentuk

Undang-Undang bertujuan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis (otentik) yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, dan perbuatan hukum sesuai Undang-Undang jabatan notaris.

c) Teori Tujuan Hukum menurut Gustav Radbruch

Mengajarkan tentang tiga konsep atau ide unsur dasar hukum (Arif Sidharta, 2007a:112), yaitu:

- Kepastian Hukum;
- Keadilan Hukum; dan
- Manfaat Hukum.

Berdasarkan teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch harus ada skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama adalah keadilan hukum, kemudian kemanfaatan hukum, dan yang terakhir adalah kepastian hukum (Arif Sidharta, 2007b: 113).

Maka demi tercapainya tujuan hukum yang menuntut kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat, asas prioritas dalam tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch dapat dijadikan sebagai dasar dan pedoman serta panduan, apalagi dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sedemikian plural dan kompleks dari berbagai latar belakang.

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan dari berbagai unsur-unsur empiris.

3.1.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor-kantor notaris yang ada di Kabupaten Malang.

3.1.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis yang dipergunakan untuk melihat kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan praktek dilapangan tentang kewajiban notaris memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu.

3.1.3 Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi dalam penelitian ini meliputi keseluruhan atau sebagian kantor notaris yang ada di Kabupaten Malang, untuk populasi ada 63 notaris yang berpraktek di Kabupaten Malang, Pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) cabang Malang, Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD) Malang.

b) Sampel

Sampel dalam penelitian ini meliputi, antara lain sebagai berikut:

- Sepuluh notaris yang berpraktek di Kabupaten Malang khususnya yang berada di Kecamatan Kepanjen;
- Ketua Majelis Pengawas daerah (MPD) Malang;
- Ketua Ikatan Notaris Indonesia (INI) Malang; dan
- Klien.

3.1.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis Data dalam Penelitian ini meliputi:

a) Data Primer

- Wawancara; dan
- Kuisioner.

b) Data Sekunder

Terdiri dari data, yaitu sebagai berikut:

- Data Hukum Primer;
- Data Hukum Sekunder; dan
- Data Hukum Tersier.

3.1.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini dianalisis secara yuridis kualitatif, artinya dari data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dan disusun secara sistematis, sehingga mencapai suatu kejelasan sesuai dengan permasalahan.

4. Hasil Diskusi dan Pembahasan

4.1 Hasil Penelitian

Dalam rangka melaksanakan kewajiban berdasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Jabatan Notaris khususnya pasal 37 ayat (1) tentang kewajiban notaris memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu di dasari oleh tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- a) Segi kemanusiaan, bantuan hukum kepada orang miskin dalam bidang kenotariatan didasarkan dilatarbelakangi dorongan kemanusiaan karena adanya dorongan empati dan simpati dari diri notaris untuk membantu sesama manusia dalam hal ini masyarakat dari golongan miskin;
- b) Segi apa adanya dari klien yang menjelaskan mengenai keterbatasan ekonomi penghadap, bantuan pelayanan hukum oleh notaris kepada masyarakat miskin diawali dengan pengakuan jujur dari penghadap yang tergolong masyarakat miskin dan selanjutnya menyebabkan hati nurani seorang notaris terpanggil; dan
- c) Segi kepercayaan notaris yang berasal dari hati bahwa penghadap memang benar-benar orang miskin, pemberian bantuan hukum secara gratis oleh seorang notaris karena keyakinan notaris yang

awalnya muncul karena penilaian notaris kepada klien penghadap.

Sesuai penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara kepada klien notaris bisa didapat hal-hal sebagai berikut:

- a) Responden klien notaris yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga, pada wawancara yang peneliti lakukan bahwa ia ingin membuat akta hibah dari salah seorang keluarganya, dan karena keterbatasan biaya ia mengajukan keringanan biaya dalam pembuatan akta hibah tersebut;
- b) Responden klien notaris yang berprofesi sebagai pekerja pabrik yang membuat akta jual beli dan meminta keringanan tentang biaya akta jual beli tersebut karena keterbatasan kemampuan finansialnya; dan
- c) Responden klien notaris yang berprofesi sebagai pegawai swasta yang mengatakan bahwa ia ke kantor notaries ingin membuat akta perjanjian kredit, dan karena keterbatasan finansialnya ia meminta keringanan biaya pembuatan akta tersebut.

Kesimpulan yang dapat peneliti simpulkan tentang wawancara yang peneliti dapati antara responden notaris dan responden klien notaris diperoleh suatu konklusi tentang latar belakang notaris memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma karena:

- a) Karena ada panggilan kemanusiaan pada notaris yang telah memberikan bantuan gratis kepada masyarakat miskin, jiwa sosial notaris disini terkait dengan rasa kemanusiaan yang dimiliki secara pribadi oleh notaris yang bersangkutan;
- b) Karena ada hubungan baik antar teman atau hubungan keluarga pada notaris dan klien penghadap yang tergolong masyarakat menengah dan akhirnya notaris memberikan bantuan hukum gratis kepada masyarakat miskin tersebut;
- c) Karena ada hubungan yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme) ketika seorang notaris memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma kepada klien penghadap yang tergolong masyarakat mampu;
- d) Menurut Ibu Siti Noer Endah, SH, selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris dan juga Pengurus INI Cabang Malang menegaskan walaupun notaris mempunyai kewajiban memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, tetapi dalam hal ini seorang notaris juga harus memakai insting dari penghadap yang dianggap tidak mampu, karena seorang notaris dituntut kepekaannya dalam menghadapi penghadap yang datang di kantornya. Selain itu Beliau juga menegaskan selama menjabat sebagai MPD beliau belum pernah menindak notaris yang menolak memberikan jasa bantuan hukum

secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu, karena tidak ada aduan dari masyarakat; dan

- e) Notaris yang ditunjuk atau direkomendasikan oleh organisasi notaris sebagai seorang notaris harus benar-benar mengemban tugas dan kewajiban sebagai seorang notaris yang bisa menjalankan fungsi jabatannya sebagai profesionalisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris.

Sesuai wawancara yang dilakukan peneliti kepada Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah Malang a/n Bapak Yudi Ansyah, SH, dengan alamat kantor, yaitu Jalan Pakis Kembar, No. 60 Pakis-Tumpang, Malang Jawa Timur) Tanggal 14 April 2017, data primer diolah, mengatakan bahwa seorang notaris dituntut untuk lebih menjunjung profesinya dalam melayani kebutuhan masyarakat, karena notaris adalah orang yang dianggap mempunyai kelebihan vital dalam pemerintahan dibidang hukum perdata, dalam hal ini diharapkan seorang notaris mampu memberikan penjelasan tentang hukum kepada masyarakat miskin serta mampu membagi pengetahuan hukum yang telah dipelajari selama menjalani praktik jabatannya, salah satunya adalah memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat miskin.

4.2 Pembahasan

Kedudukan profesi notaris sebagai pejabat umum dalam memberikan pelayanan hukum dibidang kenotariatan dapat juga diberikan secara cuma-cuma khususnya kepada klien yang tergolong masyarakat kurang mampu. Adapun mengenai persyaratan untuk mendapatkan pelayanan secara cuma-cuma dari seorang notaris tidak diatur secara rinci dalam UUJN, secara tersirat dalam hal ini peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Dyah Aju Wisnuwardhani, SH.MH selaku wakil ketua INI Cabang Malang yang mengatakan bahwa seharusnya memang harus ada batasan tegas mengenai kriteria yang ada dalam Undang-Undang tentang batasan orang tidak mampu.

Berdasarkan keterangan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang UUJN di Kabupaten Malang, khususnya kajian tentang Pasal 37 ayat (1) dan (2) memiliki pengertian bahwa pemberian jasa di bidang kenotariatan dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu karena kemanusiaan yang didasari oleh moralitas dan integritas seorang notaris, serta ditunjang juga oleh ilmu pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang salah satunya mengenai kewajiban memberikan bantuan hukum gratis

kepada masyarakat miskin, karena tanpa pengetahuan yang cukup tentang ketentuan terhadap salah satu kewajibannya, maka kewajiban tersebut tidak dapat diterapkan dalam menjalankan profesi di lingkungan masyarakat.

Dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN harus mencerminkan nilai-nilai dasar keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Sajipto Raharjo, 2000:19). Terlaksananya ketentuan kewajiban yang tertuang dalam pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dan pasal 3 ayat (7) kode etik notaris akan meningkatkan harkat dan martabat notaris dan menambah kepercayaan masyarakat yang menyangkut pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan.

Sesuai dinamika kehidupan yang peneliti amati di wilayah yurisdiksi Kabupaten Malang khususnya di Kecamatan Kepanjen bahwa memang ada fenomena tentang pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma yang dilakukan seorang notaris walaupun tidak murni memberikan jasa bantuan secara cuma-cuma, hal ini berimplementasi pada pengurangan jasa biaya yang diberikan oleh notaris berdasarkan pertimbangan rasional seorang notaris.

Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur tentang tuntutan bagi seorang notaris untuk selalu meningkatkan kualitas ilmu, kualitas moral, kualitas sosial, serta menjunjung tinggi martabat sebagai seorang notaris, sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus selalu didasarkan pada landasan kode etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Makna dari Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai keberadaan sanksi jabatan notaris berimbang dalam dua sisi, internal dan eksternal. Secara internal ditandai dengan pembentukan kesadaran terhadap diri notaris bahwa pada saat ia menjalankan kewenangan jabatannya, nilai keluhuran martabat dan tanggung jawab selaku pejabat umum harus dijunjung tinggi setinggi-tingginya. Sedangkan secara eksternal kepentingan publik atau masyarakat tetap terjaga dengan baik dan akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap profesi seorang notaris.

Mengenai nilai dari implementasi pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma pada masyarakat yang tidak mampu telah diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Jabatan Notaris bisa digolongkan kedalam nilai ketiga. Tujuan dari nilai ini adalah untuk menjabarkan dan memperjelas suatu nilai di dalam implementasi pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma pada masyarakat yang tidak mampu dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN sehingga tidak menimbulkan multi tafsir, sehingga nilai-nilai dari pemberian jasa hukum secara cuma-cuma dalam Pasal 37 ayat (1) UUJN sudah diatur, hanya saja ketentuan

tersebut belum terjabarkan dengan jelas sehingga diperlukan penjabaran lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Secara nyata praktek notaris yang berkantor di wilayah yurisdiksi Kabupaten Malang, khususnya di Kecamatan Kepanjen, berdasarkan hasil penelitian bahwa masih ada masyarakat tidak mampu yang meminta jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma karena klien yang berhubungan dengan notaris pada umumnya orang atau masyarakat yang tingkat perekonomiannya menengah keatas, karena golongan masyarakat menengah kebawah jarang bahkan tidak ada yang berurusan dengan masalah kenotariatan. Selain itu juga dalam praktek banyak ditemui masyarakat menengah ke atas yang memintai keringanan harga pembuatan akta jika masyarakat merasa keberatan dengan harga yang diberikan notaris.

Faktor-faktor yang menjadi kendala pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu, adalah sebagai berikut:

- a) Karena kebanyakan masyarakat awam tidak mengetahui tentang adanya Undang-Undang yang mengatur masalah pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma dalam bidang kenotariatan kepada masyarakat yang tidak mampu;
- b) Pengawasan yang dilakukan oleh MPD, MPW, dan MPP yang rendah; dan
- c) Tidak adanya batasan tegas pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu.

Berdasarkan keterangan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang UJN di Kabupaten Malang, khususnya analisis tentang Pasal 37 ayat (1) dan (2) memiliki pengertian bahwa pemberian jasa di bidang kenotariatan dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu karena kemanusiaan yang didasari oleh moralitas dan integritas seorang notaris, serta ditunjang juga oleh ilmu pengetahuan tentang ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang salah satunya mengenai kewajiban memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu, karena tanpa pengetahuan yang cukup tentang ketentuan terhadap salah satu kewajibannya, maka kewajiban tersebut tidak dapat diterapkan dalam menjalankan profesi di lingkungan masyarakat

Terakhir yang perlu peneliti kupas disini, bahwa yang telah dilakukan oleh masyarakat, notaris sendiri, dan MPD, MPW, serta MPP dalam implementasi Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan budaya hukum sebagai proses internalisasi nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam

masyarakat yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam pemahaman dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat hukum.

5. Kesimpulan

- a) Implementasi pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris berdasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 di Kabupaten Malang didasari oleh beberapa hal, yaitu sebagai berikut:
 - Segi kemanusiaan, Pemberian jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh seorang notaris didasarkan faktor kemanusiaan karena adanya dorongan moralitas dari diri notaris untuk membantu sesama manusia dalam hal ini masyarakat dari golongan tidak mampu;
 - Segi kejujuran dari penghadap sebagai klien yang menerangkan keadaan dan kondisinya secara finansial, pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh seorang notaris yang didasari keterusterangan klien pada notaris karena adanya kejujuran yang diungkapkan klien tersebut menyangkut ketidakmampuan untuk membayar honorarium atas suatu jasa yang hukum yang dibutuhkan, sehingga bisa menggugah jiwa sosial notaris yang bersangkutan untuk memberikan secara cuma-cuma; dan
 - Segi keyakinan notaris yang menilai bahwa penghadap adalah benar-benar masyarakat yang tidak mampu, pemberian jasa bantuan hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh seorang notaris karena keyakinan notaris yang awalnya muncul karena penilaian notaris kepada klien penghadap.
- b) Terkait sanksi yang diberikan berkaitan dengan Implementasi Pasal 37 ayat (2) UUNJ jika notaris tidak memenuhi yakni akan diberikan sanksi administratif, artinya ada persyaratan tertentu atau tindakan tertentu yang dilakukan atau tidak dipenuhi oleh notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berupa kewajiban dan larangan yang tercantum Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Sedangkan faktor-faktor yang menjadi kendala pemberian jasa bantuan hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma oleh notaris di Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:
 - Karena kebanyakan masyarakat awam tidak mengetahui tentang adanya Undang-Undang yang mengatur masalah pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma dalam bidang kenotariatan kepada masyarakat yang tidak mampu;
 - Pengawasan yang dilakukan oleh MPD, MPW, dan MPP yang rendah; dan

- Tidak adanya batasan tegas pemberian jasa bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu.

Daftar Pustaka

- Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Lubis, Suhwardi K. (1993). *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nasution, Adnan Buyung. (1988). *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Otje Salman, H.R., & Susanto, Anton F. (2012). *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumnus.
- Sidharta, Arif. (2007). *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Refika Aditama, Bandung.
- Soekanto, Soerjono. (2003). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.